

Pengelolaan Penerapan Satu Data Indonesia Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

^{1*}Yudi Agusta, ²I Made Agus Wirahadi Putra

Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali ^{1,2}

*Email: yudi@stikom-bali.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan Satu Data Indonesia di berbagai daerah di Indonesia sangat beragam, tidak terkecuali dengan penerapan di Pemerintah Kabupaten Badung melalui pelaksananya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Kondisi yang berbeda yang dihadapi di Pemerintah Kabupaten Badung membuat pelaksanaan penerapan Satu Data Indonesia di Kabupaten Badung memerlukan penanganan lebih lanjut. Di dalam kegiatan ini, beberapa hal dilaksanakan dengan tujuan untuk menstandarkan proses penerapan Satu Data Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan SOP Pelaksanaan Pengumpulan Data dan SOP Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Workshop Penentuan Informasi (Daftar Data) Dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Badung, Workshop Standarisasi Sistem Badung Satu Data, dan Pembekalan Pelaksanaan Pengumpulan Data atau Sistem Data Operasional Kabupaten Badung. Dari pelaksanaan kegiatan ini beberapa hal ditetapkan seperti penyusunan daftar data (informasi) diambil dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Data dari Sistem E-Wali, Data dari Sistem SIPD, dan Statistik yang Dikumpulkan BPS, data yang dikumpulkan di dalam Sistem Badung Satu Data perlu untuk dilengkapi untuk memudahkan pengelolaan, pelayanan, dan pengadministrasian Satu Data, dan pembekalan perlu untuk terus dilaksanakan karena keterbatasan dan pergantian SDM yang sering terjadi.

Kata kunci: Satu Data Badung, Sistem Data, Gudang Informasi

ABSTRACT

The implementation of One Data Indonesia in various regions in Indonesia is very diverse, including the implementation in the Badung Regency Government through its implementation by the Badung Regency Communication and Informatics Office. The different conditions faced by the Badung Regency Government make the implementation of One Data Indonesia in Badung Regency require further handling. In this activity, several things are carried out with the aim to standardize the process of implementing One Data Indonesia. Some of the activities carried out are the Preparation of SOPs for Data Collection Implementation and SOPs for Statistical Activities Implementation, a Workshop on Determining Information (Data List) in One Data Indonesia Badung Regency, a Workshop on Standardization of the Badung One Data System, and Briefing on the Implementation of Data Collection or the Badung Regency Operational Data System. From the implementation of this activity, several things were determined, such as the preparation of a list of data (information) taken from the Regional Government Administration Report, Regional Development Work Plan, Data from the E-Wali System, Data from the SIPD System, and Statistics Collected by BPS, data collected in the Badung One Data System needs to be completed to facilitate the management, service, and administration of One Data, and provisioning needs to be carried out continuously due to the limitations and frequent changes in human resources.

Key words: One Data Indonesia, Data System, Information Warehouse

PENDAHULUAN

Konsep Satu Data Indonesia sudah dituangkan di dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Memasuki pelaksanaannya di tahun keenam, penerapan konsep Satu Data Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia sangat beragam (Adinegoro et al, 2025). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terkait dengan pemahaman konsep Satu Data Indonesia. Beberapa institusi memahami konsep Satu Data Indonesia, bahwa data operasional yang digunakan untuk mencatat kegiatan program kerja sebagai Satu Data, ada yang memahami bahwa data yang disummary sebagai dasar pengambilan keputusan sebagai bagian dari Satu Data Indonesia.

Dari pemahaman keilmuan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pengelolaan data bisa dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama adalah penyediaan sistem data (*data systems*) yang mengakomodasi pencatatan data operasional (Rainer and Prince, 2023). Tahap kedua adalah penyediaan sistem gudang informasi (*information warehouse*) yang mengakomodasi penyimpanan *data summary* yang diolah dari data yang ada di sistem data (Vaisman and Zimanyi, 2023). Tahap ketiga adalah penyedian sistem penggalian pengetahuan (*knowledge mining*) yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dimana sumber data/informasinya didapat dari sistem data/sistem gudang informasi (Cleve and Lammel, 2024).

Pemahaman keilmuan terkait pengelolaan data sering digabung, sehingga kesatuan konsep terkait penerapan Satu Data Indonesia menjadi bermasalah. Hal ini juga terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Kabupaten Badung sendiri sudah memiliki sistem Badung Satu Data, tetapi konsep detail kebutuhan data pendukung masih belum

menyatu, operasional terkait penyediaan data dalam bentuk sistem data masih belum menjadi satu kesepahaman, serta kebutuhan akan informasi juga masih tidak diperjelas.

Untuk keperluan meningkatkan kapasitas stakeholder dan untuk menstandarkan penerapan Satu Data Indonesia pada Sistem Badung Satu Data, pengabdian masyarakat terkait Satu Data Indonesia di Dinas Kominfo Kabupaten Badung ini dilaksanakan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Badung dalam penerapan Satu Data Indonesia adalah:

1. Kurangnya kesepahaman terkait informasi yang dibutuhkan dalam konsep Satu Data Indonesia
2. Kurangnya pemahaman terkait pengumpulan data melalui penyediaan sistem data operasional
3. Konsep pengembangan Sistem Badung Satu Data masih belum standar.

METODE

Metode yang diterapkan di dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Workshop Penentuan Informasi Dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Badung: Dalam kegiatan ini dilaksanakan perumusan terkait pola penetapan informasi (atau diistilahkan sebagai daftar data) yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerja di Kabupaten Badung. Untuk kebutuhan ini, kolaborasi perumusan dengan stakeholder, khususnya dengan Bappeda Kabupaten Badung perlu dilaksanakan

Workshop Standarisasi Sistem Badung Satu Data: Dalam kegiatan dilaksanakan perumusan terkait standar data yang dibutuhkan untuk didata pada Sistem Badung Satu Data. Ketersediaan data

kegiatan statistik, data metadata dari informasi yang dikumpulkan, pengelola, dan sumber data lainnya perlu disatukan.

Pembekalan Proses Pengumpulan Data dan Sistem Data Opeerasional: Dalam kegiatan ini pembekalan terhadap pengelola pengumpulan data atau sistem data di masing-masing dinas di Pemerintah Kabupaten Badung dilaksanakan. Pembekalan dilaksanakan terkait bagaimana men standarisasi sistem data, memantau kualitas, melakukan pelaporan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyampaian data pada Sistem Badung Satu Data.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Sistem Data dan Satu Data Indonesia: Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyusunan SOP untuk menaungi dua kegiatan yaitu SOP Pengumpulan Data Operasional dan SOP Pelaksanaan Satu Data Indonesia. Dengan kedua SOP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dari hulu sampai hilir terkait Satu Data Indonesia bisa terlaksana dengan terstandarisasi.

Metodologi yang diterapkan di dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Metodologi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

PEMBAHASAN

Pembahasan difokuskan pada empat kegiatan yaitu Workshop Penentuan Informasi Dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Badung, Workshop Standarisasi Sistem Badung Satu Data, Pembekalan Proses Pengumpulan Data dan Sistem Data Opeerasional, dan Penyusunan SOP Pelaksanaan Sistem Data dan Satu Data Indonesia.

Workshop Penentuan Informasi Dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Badung

Kegiatan workshop dilaksanakan dengan melakukan perumusan proses pengumpulan informasi (daftar data) dari berbagai stakeholder yang datanya dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerja. Perumusan kebutuhan data dilaksanakan untuk masing-masing dinas pada Pemerintah Kabupaten Badung.



Gambar 2. Perumusan Penentuan Informasi Satu Data Indonesia Kabupaten Badung

Dalam perumusan ini diputuskan untuk menentukan informasi (daftar data) yang akan dikelola dari berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Data dari Sistem E-Wali, Data dari Sistem SIPD, dan Statistik Yang Dikumpulkan BPS. Dari inventarisasi tersebut akan diusulkan informasi (daftar data) yang akan dikelola di dalam konsep Satu Data Indonesia Kabupaten Badung.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah telah dirumuskannya list informasi (daftar data) yang dibutuhkan oleh masing-masing.

Akan tetapi dengan jumlah informasi/daftar data yang terinventarisasi dalam jumlah yang cukup banyak, konfirmasi kevalidan daftar data dan kajian kemungkinan tindak lanjut dalam merumuskan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagai tindak lanjut dari daftar data, perlu untuk menjadi bahan perumusan lebih lanjut.

Workshop Standarisasi Sistem Badung Satu Data



Gambar 3. Perumusan Standarisasi Sistem Badung Satu Data

Workshop standarisasi Sistem Badung Satu Data dilaksanakan dengan mengevaluasi terlebih dahulu sistem Badung Satu Data Kabupaten Badung dengan melihat komposisi informasi yang ditayangkan. Di samping itu, perumusan bersama dengan tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Badung baik staf operasional dan programmer pengembang Sistem Badung Satu Data memberikan insight kondisi Sistem Badung Satu Data saat ini.

Dari hasil evaluasi tersebut dilaksanakan perumusan terkait ketersediaan data yang dibutuhkan untuk diakomodasi di dalam Badung Satu Data. Beberapa informasi terkait meta data informasi dan data kegiatan pengumpulan data menjadi evaluasi pengembangan lebih lanjut untuk bisa diakomodasi dalam pengembangan selanjutnya. Evaluasi tampilan data juga dilaksanakan, sehingga data/informasi yang dibutuhkan oleh pengguna data dan stakeholder dapat diperoleh dengan mekanisme yang lebih mudah. Pola untuk menyediakan kostumisasi tampilan yang menyesuaikan pada kebutuhan informasi per stakeholder

juga diusulkan sehingga kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh masing-masing stakeholder bisa didapatkan.

Pembekalan Proses Pengumpulan Data dan Sistem Data Operasional



Gambar 4. Pembekalan Proses Pengumpulan Data dan Sistem Data Operasional

Pembekalan proses pengumpulan data dan sistem data operasional dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan kapasitas bagi pengelola pengumpulan data operasional atau pengelola sistem data operasional di masing-masing dinas di Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan terkait tahapan kegiatan pengumpulan data, sampai dengan kegiatan untuk mendiseminasi data pada Sistem Badung Satu Data. Berbagai tools yang digunakan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai standar juga diperkenalkan, sehingga diharapkan setiap kegiatan pengumpulan data dan pemanfaatan sistem data operasional dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan ini juga mengacu berbagai peraturan pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik termasuk kegiatan pelaporan kegiatan statistik dan statistik/informasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Dengan tahapan yang berkualitas, data yang dikumpulkan juga diharapkan akan berkualitas.

Dari kegiatan pembekalan ini, terjadi peningkatan kapasitas pemahaman pengelola data pada berbagai dinas di

Pemerintah Kabupaten Badung. Dari yang tidak mengetahui proses pelaksanaan pengumpulan data yang terstandarisasi, menjadi pengelola yang mempunyai wawasan tata kelola pengumpulan data. Dari yang tidak tahu kaitan kegiatan sehari-hari dengan Satu Data Indonesia, menjadi pengelola yang dapat memahami keterkaitan sistem pengumpulan data operasional dengan keberadaan Sistem Badung Satu Data.

Tantangan ke depan yang selalu ada adalah adanya perubahan komposisi SDM yang mengelola pelaksanaan kegiatan statistik dan SDM yang mengelola proses diseminasi data masing-masing unit kerja. Kegiatan pembekalan akan perlu dilaksanakan secara berkala, dan untuk SDM baru yang ditugaskan serta merta harus diberikan pembekalan, sehingga proses pengumpulan data dan proses diseminasi informasi yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja, bisa lebih terstandarisasi.

Penyusunan SOP Pelaksanaan Sistem Data dan Satu Data Indonesia

Penyusunan SOP untuk kebutuhan penerapan Satu Data Indonesia di Kabupaten Badung dikelompokkan menjadi dua kegiatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Satu Data Indonesia. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Operasional mencakup beberapa tahapan kegiatan seperti identifikasi kebutuhan data, penyusunan kuesioner dan buku pedoman, pelaporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pelatihan petugas pengumpulan data dan petugas pengolahan data, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengawasan pengumpulan data, kegiatan pengolahan data, kegiatan analisa data, dan kegiatan diseminasi data. Masing-masing tahapan disertai dengan tools yang dibutuhkan untuk proses evaluasi keberhasilan kegiatan.

Dari hasil perumusan SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Operasional

didapatkan sebanyak 28 tahapan kegiatan yang merupakan kolaborasi antara 8 stakeholders termasuk Sekretariat, Wali Data, Pembina Data, Penanggung Jawab Pendataan, Programmer, Pendata, Pengolah Data, dan Pengawas/Supervisor.

Untuk SOP Pelaksanaan Kegiatan Satu Data Indonesia, tahapan yang dicakup mulai dari penetapan informasi (daftar data), penetapan meta data untuk masing-masing informasi, input informasi di dalam Sistem Badung Satu Data, input analisa informasi, konfirmasi informasi oleh pengawas, proses perolehan/pemesanan informasi oleh stakeholder, dan penyusunan laporan pelaksanaan Satu Data Indonesia tahunan di Kabupaten Badung.

Dari hasil perumusan SOP SOP Pelaksanaan Kegiatan Satu Data Indonesia didapatkan sebanyak 30 tahapan kegiatan yang merupakan kolaborasi antara 7 stakeholders termasuk Bappeda, Wali Data, Pembina Data, Forum Satu Data, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Produsen Data/Walidata Pendukung/ Penanggung Jawab Pendataan, dan Pengguna Data.



Gambar 5. Perumusan Penyusunan SOP Pelaksanaan Sistem Data dan Satu Data Indonesia

SIMPULAN

Ada beberapa simpulan yang bisa dirumuskan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan:

1. Daftar data (informasi) yang akan dikumpulkan di dalam Sistem Badung Satu Data sudah dirumuskan, dan akan dijadikan acuan secara bertahap dalam

- pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Badung
2. Sistem Badung Satu Data akan dilengkapi sesuai dengan evaluasi yang didapatkan dan pengembangan berdasarkan evaluasi tambahan akan dilaksanakan menyesuaikan pada keterediaan programmer.
 3. Pembekalan proses pengumpulan data dan sistem data operasional sudah dilaksanakan, tetapi karena SDM yang sering berganti, maka proses pembekalan pelaksanaan pengumpulan data operasional dan pengelolaan sistem data operasional perlu secara rutin dilaksanakan.
 4. SOP Pelaksanaan Sistem Data dan SOP Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Badung sudah tersusun dan akan dijadikan acuan pelaksanaan dua kelompok kegiatan tersebut di waktu ke depan.

Pemantauan terhadap pelaksanaan kapasitas SDM pengelolaan sistem data operasional perlu untuk terus dilaksanakan dan pembekalan perlu untuk dijadwalkan secara rutin. Pengembangan tambahan Sistem Badung Satu Data perlu segera dilaksanakan sehingga berbagai data yang perlu dikelola di dalam Sistem Badung Satu Data sudah tersedia semua dan bisa disosialisasikan serta digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai dengan pendanaan dari Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali, dengan nomor pendanaan

sebagai berikut 413.26/DIR.PPM&HKI/WRI/ITBSTIKOM/XI/24.

Kegiatan ini juga didukung oleh dua orang mahasiswa Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali. Kedua mahasiswa berperan dalam mendukung kegiatan penyiapan kegiatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I. & Arrahman, T., (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan Dan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan, 16 (1).
- Rainer, R. K. & Prince, B., (2023). Introduction to Information Systems, 10th Edition. Wiley.
- Vaisman, A. & Zimányi, E., (2023). Data Warehouse Systems: Design and Implementation (Data-Centric Systems and Applications). Springer.
- Cleve, J. & Lämmel, U. (2024). Data Mining, 4th Edition. De Gruyter Oldenbourg.